



Strategi Regulasi Daerah Dalam Menekan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Abstrak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan suatu daerah. Sebagai provinsi dengan struktur industri yang berkembang pesat serta pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, Provinsi Banten menghadapi tantangan serius dalam menekan angka pengangguran terbuka. Dinamika pasar kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja, transformasi industri, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja, serta perubahan regulasi nasional menuntut adanya strategi regulasi daerah yang adaptif dan berbasis kepastian hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penyelenggaraan ketenagakerjaan di tingkat daerah, mengevaluasi kondisi empiris ketenagakerjaan terkini di Provinsi Banten, serta merumuskan strategi regulasi daerah yang efektif dalam menekan TPT secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan analisis sosio-legal berdasarkan data statistik dan kondisi faktual daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi daerah yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, serta hubungan industrial, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan koordinatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta kolaborasi multipihak untuk mencapai efektivitas kebijakan.

Kata kunci: regulasi daerah, pengangguran terbuka, ketenagakerjaan, otonomi daerah, kebijakan publik.

A. Pendahuluan

Permasalahan pengangguran merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi berupa hilangnya potensi produktivitas, tetapi juga berimplikasi pada persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial. Dalam konteks daerah, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengelola dinamika pasar tenaga kerja.

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah metropolitan nasional menjadikan Banten sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Kawasan Tangerang Raya, misalnya, dikenal sebagai pusat industri manufaktur dan jasa modern, sementara wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang masih bertumpu pada sektor pertanian dan ekonomi tradisional. Ketimpangan struktur ekonomi tersebut berpengaruh terhadap distribusi kesempatan kerja dan tingkat pengangguran antarwilayah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Banten dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kisaran yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun terdapat tren penurunan pascapandemi, jumlah penganggur tetap signifikan

dan menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem ketenagakerjaan daerah. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi regulasi daerah menjadi instrumen penting dalam menekan angka pengangguran terbuka dan menciptakan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan serta berkelanjutan.

B. Kerangka Hukum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah

Dalam perspektif konstitusional, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak dasar warga negara. Negara berkewajiban menciptakan kebijakan yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan kerja yang adil dan layak. Dalam sistem negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, kewajiban tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Kewenangan daerah dalam bidang ketenagakerjaan mencakup perencanaan tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan hubungan industrial, serta fasilitasi penyelesaian

perselisihan hubungan kerja. Regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan dinamika sosial-ekonomi setempat.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, bertanggung jawab melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas sektor.

C. Kondisi Terkini Ketenagakerjaan di Provinsi Banten

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang kompleks. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, didorong oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja setiap tahun. Di sisi lain, kemampuan sektor industri dan jasa dalam menyerap tenaga kerja belum sepenuhnya seimbang dengan pertumbuhan tersebut.

Struktur pengangguran di Banten didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran terdidik. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan

industri. Transformasi industri menuju digitalisasi dan otomatisasi juga berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu.

Ketimpangan wilayah turut memengaruhi distribusi kesempatan kerja. Wilayah yang memiliki kawasan industri cenderung memiliki peluang kerja lebih besar dibandingkan wilayah yang mengandalkan sektor pertanian tradisional. Hal ini menimbulkan konsentrasi pencari kerja di daerah perkotaan dan meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja.

Selain itu, sektor informal masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun sektor ini berkontribusi dalam mengurangi pengangguran terbuka, pekerja informal umumnya menghadapi keterbatasan perlindungan hukum dan jaminan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan daerah perlu mempertimbangkan aspek formalitas dan perlindungan pekerja secara menyeluruh.

D. Evaluasi Implementasi Regulasi Daerah

Regulasi daerah di bidang ketenagakerjaan telah mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, hingga pengawasan hubungan industrial. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala.

Pertama, sistem informasi pasar kerja belum sepenuhnya terintegrasi. Data pencari kerja dan lowongan kerja sering kali tidak diperbarui secara real-time sehingga menghambat proses pencocokan antara kebutuhan industri dan

kompetensi tenaga kerja. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas program penempatan kerja.

Kedua, pelatihan kerja yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan industri. Kurikulum pelatihan sering kali bersifat umum dan belum terfokus pada kompetensi spesifik yang dibutuhkan pasar. Akibatnya, lulusan pelatihan belum sepenuhnya terserap oleh dunia usaha.

Ketiga, pengawasan ketenagakerjaan masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan sumber daya pendukung. Kondisi ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan serta perlindungan pekerja.

Keempat, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan belum optimal. Perbedaan prioritas dan keterbatasan anggaran sering kali menghambat sinkronisasi kebijakan.

E. Strategi Regulasi Daerah dalam Menekan Pengangguran Terbuka

Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka secara efektif, diperlukan strategi regulasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Pertama, harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional menjadi langkah mendesak. Perubahan regulasi nasional di bidang ketenagakerjaan harus direspons melalui penyesuaian peraturan daerah agar

tidak terjadi disharmonisasi norma hukum. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan pekerja.

Kedua, penguatan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital perlu menjadi prioritas. Sistem tersebut harus mampu menyediakan data real-time mengenai pencari kerja, lowongan, serta kebutuhan kompetensi industri. Integrasi data antarinstansi akan meningkatkan akurasi perencanaan tenaga kerja.

Ketiga, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri harus diperkuat. Kerja sama dengan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan magang, dan sertifikasi kompetensi akan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Keempat, penciptaan lapangan kerja baru melalui kebijakan investasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu didorong. Insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal dapat menjadi instrumen regulasi yang efektif.

Kelima, perlindungan pekerja rentan dan sektor informal harus menjadi bagian integral dari strategi ketenagakerjaan. Akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat harus diperkuat. Pendekatan kolaboratif akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

F. PENUTUP

Permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten merupakan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan regulasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, integrasi sistem informasi, serta kolaborasi multipihak.

Strategi regulasi yang efektif harus mengintegrasikan aspek normatif dan empiris, serta mempertimbangkan transformasi ekonomi dan dinamika pasar kerja. Melalui revitalisasi pelatihan, pengembangan kewirausahaan, insentif investasi berbasis serapan tenaga kerja, dan perlindungan pekerja secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat menekan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan.

Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target statistik, tetapi juga pada penciptaan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Banten dalam jangka panjang.